

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Partai politik merupakan pilar penting dalam terselenggaranya negara yang demokratis. Salah satunya berfungsi sebagai mediator yang mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi serta tuntutan politik dari masyarakat ke pemerintah sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan kehendak rakyat. Partai Poitik merupakan suatu kelompok yang teroganisir dan anggotanya mempunyai orientasi pandangan nilai dan tujuan yang sama, tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan melalui cara yang konstitusional untuk menjalankan kebijaksanaan yang dimiliki¹.

Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan di negara demokrasi. Baik pemilu untuk legislatif maupun eksekutif. Pemilu merupakan rangkaian puncak kegiatan pesta demokrasi bagi Partai Politik yang berkompetisi di dalamnya. Pemilu menjadi ajang pertarungan/lomba bagi kader-kader partai di eksekutif maupun di legislatif yang selalu banyak sekali intrik dan drama didalamnya.

Partai Politik menjadi “kendaraan” politik bagi para kader-kadernya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut. Bahkan dalam Pemillihan Legislatif anggota Dewan, hanya Partai Politik yang menjadi jalan seseorang untuk mencalonkan diri. Hal sudah ada diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

¹ Miriam Budiarmo : *Dasar-Dasar Ilmu Politik* cetakan kesembilan (Jakarta : Cv Prima medika, 2013) Hlm 403-404

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik”. Hal ini berarti bahwa kader-kader partai politik nantinya akan menjadi penentu kebijakan untuk masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Partai Politik ditinjau dari Komposisi dan Keanggotaannya secara umum di Kategorikan menjadi 2 Macam. Pertama Partai berbasis Massa dan Partai Berbasis Kader. Pertama, Partai Massa ialah partai yang mengutamakan keunggulan jumlah anggota (Mobilisasi Politik), yang terdiri dari pendukung-pendukung berbagai aliran-aliran politik dalam masyarakat yang memiliki tujuan dan ideologi yang sama. Kedua yaitu Partai Kader ialah Partai yang mengandalkan Penguatan dan pengetatan organisasi serta disiplin kerja dari anggotanya.²

Ditinjau dari segi peraturan sistem pemilu, pemilu 2019 berbeda dari pemilu yang sebelumnya. Sistem yang digunakan adalah sistem pemilu proporsial dan daftar calon terbuka, sedangkan cara penetapan anggota legislatif juga terdapat perubahan yakni tidak lagi memakai nomor urut. Tapi berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 desember 2009 memutuskan memakai sistem suara terbanyak.

Dalam pemilihan umum tahun 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai peserta yang lolos secara verifikasi, administrasi dan keikutsertaan kader. PPP salah satu partai besar dan mempunyai sejarah cukup banyak dalam pemilu Indonesia beberapa puluh tahun ke belakang. Partai

² A.rahman H.I : *Sistem politik Indonesia (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007) Hlm. 104-105*

berideologikan Islam ini sangat berpengaruh dalam sistem Perpolitikan Indonesia pada masa orde lama sampai sekarang.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lahir Tanggal 05 Januari 1973 melalui deklarasi dari 4 Partai Islam pada masa orde baru yaitu Partai NU (Nahdatul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) dan Perti (Partai Tarbiyah Islam). Warna hijau tua dan berlambangkan ka'bah menjadi identitas PPP hingga saat ini.³

PPP memiliki target pada pemilu 2019 kali ini, banyak program-program yang dijalankan oleh seluruh dewan Pimpinan dan anggota partai dari berbagai daerah demi tercapainya target yaitu meraih suara sebanyak mungkin dalam pemilihan umum tahun 2019 baik pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif. Salah satunya menempatkan kader-kader PPP di kursi pemerintahan sebanyak-banyaknya.

Salah satu program yang selalu dilaksanakan PPP adalah melakukan proses Pengkaderan yang berkelanjutan bagi kader-kader partai yang berkualitas, memiliki kapabilitas dan integritas yang baik, dan dapat menarik minat masyarakat dalam memilih partai dan calon tersebut. Dan juga dapat membantu meningkatkan Rating Partai di Perpolitikan Lokal di Kota Tasikmalaya.

Proses Pengkaderan sudah ada dan tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PPP Bab II pasal Keanggotaan Partai. Dalam AD/ART tersebut menjelaskan bagaimana Tatacara menjadi Anggota Partai dan menjelaskan secara umum bagaimana menjadi calon Anggota Legislatif Partai.

³ Drs. H. Abd. Asri Harahap, MM : *PPP sintesa Nasionalisme dan religiusitas* (Jakarta : Integritas Dinamika Press, 2004) Hlm. 86

Proses Pengkaderan PPP pada umumnya diantaranya proses rekrutmen dari berbagai kalangan tetapi yang diutamakan adalah Kader PAC dan organisasi-organisasi dibawah naungan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian proses penyaringan, pengkaderan berjenjang dari tahap awal, menengah hingga lanjutan sampai calon legislatif siap untuk bersaing di pemilihan legislatif mendatang. LDKP (Latihan Dasar Kader Partai) merupakan salah satu Proses Pengkaderan Partai PPP sampai hari ini. LDKP berbentuk pelatihan dasar kepartaian dan pendidikan politik untuk calon anggota yang baru memulai karier politik di PPP.

Pada tahun 2019, PPP diterpa dengan kasus besar, dimana para petinggi tersandung kasus suap. Diantaranya Ketua Umum PPP Pusat Romahurmuziy diduga terlibat dalam kasus suap. Kemudian ada isu bahwa PPP terbelah menjadi dua kubu yaitu kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz yang memiliki orientasi dan tujuan politik yang berbeda.

Permasalahan ini tak sampai di pusat saja, tetapi di daerah ada juga pemimpin PPP yang terjerat kasus yang sama. Di Kota Tasikmalaya salah satunya. Pimpinan DPC Kota Tasikmalaya sekaligus Walikota Tasikmalaya Budi Budiman terjerat kasus suap dana perizinan daerah. Masyarakat Kota Tasikmalaya kaget sekaligus terpuak dengan kejadian ini. Hal ini berimbas kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada PPP di Pemilu 2019 lalu. Pemilu 2019, PPP mengalami penurunan suara dari tahun sebelumnya yang diperkirakan akibat adanya kasus ini. Terutama dalam perebutan kursi dewan di pusat maupun di daerah. Ditambah lagi dengan banyaknya para kader-kader militan partai tersebut berpindah haluan ke partai lain.

Untuk itu salah satu strategi untuk mempertahankan eksistensi perpolitikan lokal di Kota Tasikmalaya, PPP harus berbenah mencari dan membentuk kader-kader baru yang memiliki potensi untuk menjadi pejabat publik dan dapat menyakinkan masyarakat. Kader-kader yang loyal dan militan dengan kepentingan partai tidak goyah dengan terpaan isu yang ada di *intern* partai.

Memperkuat *intern* partai bisa dilakukan dengan cara pengkaderan kepada kader dan anggota partai. Menanamkan ideologi partai melalui pendidikan politik partai. Bidang OKK (Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) diamanatkan oleh ketua umum untuk membentuk program yang menunjang karier politik kader dan Anggota PPP. Agar sesuai dengan orientasi dan tujuan utama PPP yaitu menciptakan Kader yang siap berkompeten, loyal dan membawa kepentingan partai.

Salah satu Strategi dengan cara Pengkaderan yang berkelanjutan. Pengkaderan / kaderisasi yang dilakukan dengan tujuan untuk meregenerasi kader muda untuk menggantikan pemimpin dan legislator yang sudah dianggap sudah tua dikursi jabatan politik pemerintahan. serta memunculkan dan mencetak kader-kader berkompeten yang dapat mengubah arah politik suatu Negara menjadi lebih baik, tahu permasalahan yang terjadi di masyarakat serta tidak terlena dengan iming-iming materil.

Pengkaderan dalam sebuah Partai Politik menjadi sebuah persoalan penting, karena dalam partai perlu membentuk individu lebih baik sebagai pemimpin baik di dewan legislatif maupun kepala pemerintahan. Tentunya memiliki visi demokratis dan bermental jujur. Untuk itu pengkaderan dalam tubuh partai harus

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh semuanya elemen partai sebagai strategi untuk mengubah situasi seperti ini.

PPP sebagai salah satu partai islam terbesar di Indonesia berambisi untuk terus bersaing dengan partai besar lainnya dalam PEMILU 2019. Dan mengamanatkan kepada seluruh DPD, DPC, daerah di Indonesia agar selalu menang dalam setiap pemilihan. Dan juga mencari, merekrut, dan mendidik kader-kader terbaik di masyarakat agar menjadi kader-kader yang berkualitas. Kota Tasikmalaya diprediksi menjadi salah satu daerah suara pemilihan terbanyak yang diperoleh partai PPP nanti. Dan sering memenangkan pemilihan legislatif maupun eksekutif kota setiap tahunnya. Maka wajar pada Pemilu 2019 merupakan hajat rakyat yang harus dimenangkan oleh PPP di Kota Tasikmalaya. Dengan menempatkan kader-kader di kursi legislatif kota sebanyak mungkin untuk mendominasi DPRD Kota Tasikmalaya. Seperti calon anggota legislatif Kota Tasikmalaya dari Partai Persatuan Pembangunan terdapat puluhan orang yang telah menjadi calon tetap anggota legislatif di Kota Tasikmalaya.

Penetapan caleg partai menjadi pertanyaan besar ketika para kader sudah melakukan kaderisasi nantinya. Menentukan kader menjadi anggota partai yang mengurus intern partai dan kader parpol memiliki potensi kuat dari segi keilmuan dan modal materil untuk maju dalam Pemilihan Legislatif mendatang. Kota Tasikmalaya terkenal dengan kota santrinya, maka tidak mungkin PPP meraih suara sedikit di kota ini. Maka PPP diperlukan untuk memperkuat Internal Partai hingga kedaerah-daerah yang berada di Jawa Barat terutama Kota Tasikmalaya yang mempunyai potensi dalam politik islamnya sama dengan ideologi partai.

Maka dari itu, proses kaderisasi dan pengkaderan Partai politik dari dulu hingga sekarang terutama dalam mempertahankan eksistensi kekuasaan di politik lokal pada tingkat Kota Tasikmalaya. Khususnya meneliti tentang bagaimana pengkaderan calon legislatif partai PPP dari mulai perekrutan anggota hingga penetapan caleg. Atas dasar fenomena yang penulis temukan di lapangan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Studi Analisis Pengkaderan Calon Anggota Legislatif Pada Partai Persatuan Pembangunan Di Kota Tasikmalaya”

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah muncul sebagai dari adanya fenomena yang penulis temukan pada suatu keadaan di lapangan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pengkaderan Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tasikmalaya?”

3. Tujuan Penelitian

3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh Informasi dan Gambaran umumnya Kepada Mahasiswa dan Masyarakat Khalayak mengenai Proses Pengkaderan pada Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tasikmalaya. Mengetahui mekanisme perekrutan dan pendidikan partai PPP di Kota Tasikmalaya.

3.2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini untuk mengetahui data tentang :

- a. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana Tahapan dan Proses Pengkaderan Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan yang berbeda dari Partai Politik Lainnya melalui Kantor DPC Kota Tasikmalaya.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana PPP Kota Tasikmalaya dalam melakukan pendidikan, Pembinaan kepada para Anggota biasa dan Kader (Calon Legislatif) mulai dari Organisasi Kepanjang tangan Partai (Tingkat Ranting), Tingkat Anak Cabang hingga Pimpinan Cabang PPP Kota Tasikmalaya.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan/referensi Akademis Ilmu Politik. Khususnya mengenai Pola, Tahapan dan Proses Pengkaderan Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tasikmalaya. Tentunya dari pendidikan politik yang dilakukan oleh PPP selama mendidik kader barunya,

Harapan penulis Penelitian ini berguna untuk mengembangkan Khasanah Ilmu Pengetahuan dalam Bidang Ilmu Politik terutama Jurusan Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Materi mengenai dengan Pola Tahapan Proses Pengkaderan dan Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif di salah satu Partai Politik. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan memberikan saran kritik dan masukan bagi Partai Politik yang terkait informasi tentang pengembangan Pengkaderan Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tasikmalaya.

4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, Harapan dari Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Instansi dan Institusi Pendidikan dalam mengevaluasi Pelaksanaan Pengkaderan atau Kaderisasi kepada Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya. Selain itu juga, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik.

5. Batasan Penelitian

Penelitian ini mencakup proses pengkaderan calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tasikmalaya. Penelitian dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya dan meneliti tentang Proses Pengkaderan Anggota Lembaga yang sudah berjalan hingga saat ini.

Adapun beberapa tahapan proses Pengkaderan Partai Persatuan Pembangunan Cabang Kota Tasikmalaya. Diantara perekrutan Calon Anggota Partai yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan Partai. Proses pengkaderan anggota legislatif melalui pendidikan partai, filosofi partai dan kepentingan partai. *Output* dari proses

pengkaderan ini ialah mencetak kader-kader partai dan calon legislatif yang loyal, militan dan dapat membawa kepentingan partai demi kemaslahatan bersama, dan caleg PPP siap bersaing dengan Caleg Partai lain dalam Pemilihan Legislatif mendatang.